

## **CISDI Dorong Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Data Kesehatan, Sampaikan Empat Rekomendasi**

**Jakarta, 14 Oktober 2022** – Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mendorong pemerintah segera memperbaiki tata kelola data dan informasi kesehatan. Pengelolaan data selama ini masih bersifat ego-sektoral karena penataannya terpecah antara otoritas lembaga dan kementerian berbeda. Indonesia juga belum secara optimal menerapkan prinsip interoperabilitas atau kesinambungan penggunaan data.

“Sektor kesehatan memproduksi banyak sekali data, yang jika digabungkan dan dianalisis dapat menjadi *insight* yang membantu operasional keseharian fasilitas layanan kesehatan dan kantor asuransi kesehatan. Mengkombinasikan sumber-sumber informasi kesehatan yang berbeda juga dapat membantu pengambil kebijakan membuat patokan kinerja dan menargetkan intervensi sehingga *delivery* layanan bisa lebih berkualitas dan efisien.” ujar Yurdhina Meilissa, Chief Strategist CISDI.

Yurdhina meyakini fragmentasi data kesehatan yang masih terjadi menyulitkan seluruh pihak menyarikan lebih banyak *insight* dari data yang ada. Akibatnya misalnya, ketidaktepatan dalam *targeting* (*mis-targeting*). Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi rujukan bagi banyak program bantuan sosial di Indonesia bergantung pada database kependudukan, sistem pencatatan sipil dan statistik vital (Civil Registration and Vital Statistic/CVRS).

“Namun, DTKS yang jarang di-*update* dan sistem identifikasi dan otentikasi JKN yang tidak terintegrasi secara memadai dengan sistem verifikasi NIK mengakibatkan tingginya risiko duplikasi *entry* pada data kepesertaan program JK, *fraud*, dan juga penyalahgunaan identitas untuk mendapatkan akses terhadap paket manfaat. Cakupan kepemilikan NIK dan KTP yang rendah juga menjadi penyebab eksklusi kelompok rentan,” ujarnya

Di samping interoperabilitas data yang belum optimal, hingga saat ini Indonesia belum memiliki instansi pusat yang berwenang melakukan pembinaan dan standarisasi terkait data atau dikenal dengan pembina data. Hingga saat ini, Presiden belum menetapkan pembina data untuk data sektor kesehatan dalam Perpres Satu Data Indonesia.

Penetapan pembina data untuk sektor kesehatan ini penting agar dapat menjadi acuan seluruh instansi, baik pusat maupun daerah, dalam proses bagi dan pakai data kesehatan serta integrasi data kesehatan.

Hal lain juga perlu diperhatikan adalah kesenjangan data kesehatan. Ambisi pemerintah melaksanakan transformasi digital sektor kesehatan belum dibarengi pemerataan infrastruktur dan SDM kesehatan yang memadai. Di tingkat layanan primer, sebagai contoh, temuan Riset Fasilitas Kesehatan 2019 menyebut terdapat 21,3% atau 2.097 puskesmas yang belum terfasilitasi akses internet. Ditambah lagi hanya terdapat 2,19% puskesmas di Indonesia yang memiliki nakes khusus bidang informatika kesehatan (Infokes).

Pemerataan infrastruktur dan SDM kesehatan tersebut perlu diperhatikan mengingat Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis menetapkan kewajiban layanan kesehatan mengimplementasikan Rekam Medis Elektronik dengan masa transisi hingga 31 Desember 2023.

“Sementara dari sisi kapasitas layanan kesehatan, sebanyak 38,1% atau 3.745 puskesmas belum memiliki Sistem Pencatatan Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Akibatnya informasi disalin secara manual beberapa kali dengan potensi *error* yang tinggi,” ungkap Yurdhina kembali.

Berdasarkan catatan tersebut, CISDI memberikan beberapa rekomendasi:

1. Kemenkumham, DPR RI, dan Panitia Undang-undang DPD meninjau peraturan perundangan terkait tata kelola data dan informasi kesehatan agar ada harmonisasi peraturan.
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengesahkan peraturan mengenai Standar Interoperabilitas Data yang menjadi acuan bagi Pembina Data di sektor yang lebih spesifik.
3. Bappenas mengusulkan Kementerian Kesehatan sebagai Pembina Data sektor kesehatan kepada Presiden.
4. Kementerian Kesehatan meningkatkan kesiapan infrastruktur pendukung dan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui alokasi anggaran dan pendekatan sosialisasi yang baik mengenai tata kelola data dan transformasi digital kesehatan.

-SELESAI-

## **Tentang CISDI**

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah lembaga non-profit yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.

***Informasi lebih lanjut***

*Amru Sebayang*

*Content & Media Officer*

*+62 877 8273 4584*

*Email: [communication@cisdi.org](mailto:communication@cisdi.org)*

*[www.cisdi.org](http://www.cisdi.org)*